**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

*Grand design* reformasi birokrasi nasional dalam bentuk Peraturan Menpan No.15/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, merupakan cetak biru reformasi hingga tahun 2025. Reformasi birokrasi nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Kunci sukses reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pegawai adalah apabila seluruh aparatur negara mampu mengubah mindset dan cultural set, termasuk partisipasi masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, Mabes POLRI, telah mengusulkan dokumen usulan Reformasi Birokrasi POLRI yang meliputi 5 program, di antaranya program unggulan melalui quick wins, yaitu *quick response* samapta POLRI, transparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB, transparansi pelayanan penyidikan, dan transparansi rekruitmen personel POLRI. Program tersebut merupakan produk utama POLRI yang mempunyai daya ungkit kuat (key leverage) dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dan dapat direalisasikan serta hasilnya bisa diukur.

1

Salah satu program unggulan tersebut, yakni program transparansi rekruitmen anggota POLRI, telah mendahului kementerian dan lembaga pemerintah lainnya dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi nasional. Hal tersebut, dibuktikan melalui prestasi POLRI dalam mewujudkan penerimaan calon anggota POLRI melalui prinsip-prinsip penerimaan yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis, yang dirintis sejak tahun 2007. Sedangkan grand design reformasi birokrasi nasional baru dirintis pada tahun 2008. Artinya, POLRI telah mendahului dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Komitmen POLRI dalam mewujudkan rekruitmen yang bersih, transparan, akuntabel mendapat penghargaan dari MURI melalui penganugrahan kepada POLRI atas prestasi pemrakarsa penyelenggaraan seleksi personil POLRI secara bersih, transparan dan akuntabel. Selanjutnya pada tahun 2008, diakui oleh Sucofindo International Certification Services melalui penghargaan ISO 9001:2000 dalam menerapkan sistem manajemen mutu pada proses penerimaan Taruna Akpol Tingkat Pusat. Pada tahun 2010, Staf Deputi Sumber Daya Manusia POLRI berhasil meningkatkan prestasi tersebut melalui perolehan ISO 9001:2008 pada proses penerimaan Perwira POLRI Sumber Sarjana Tingkat Pusat dan keberhasilan dalam meningkatkan ISO 9001:2000 menjadi ISO 9001:2008 pada proses penerimaan Taruna Akpol Tingkat Pusat.

Banyak artikel-artikel seperti di atas yang memberitakan kinerja baik polisi dalam penerimaan anggota polisi baru, tetapi bisa saja berbeda yang terjadi di lapangan karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa kalau ingin menjadi polisi harus mempunyai uang yang cukup banyak kalau tidak mempunyai uang yang cukup besar kemungkinan untuk tidak lulus dalam seleksi penerimaan anggota polisi baru. Hal ini bisa saja terjadi suap-menyuap dalam penerimaan anggota polisi baru tersebut.

Dari permasalahan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Proses Penerimaan Calon Bintara Dan Perwira Polisi Dalam Prespektif Islam (Studi Kasus Polda Sultra)”

1. **Fokus Penelitian**

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada :

1. Proses penerimaan calon Bintara dan Perwira Polisi di Polda Sultra.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap proses penerimaan calon Bintara dan Perwira Polisi di Polda Sultra.
3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis perlu untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penerimaan calon Bintara dan Perwira Polisi di Polda Sultra.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang proses penerimaan calon Bintara dan Perwira Polisi di Polda Sultra.
3. **Definisi Variabel Penelitian**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul proposal ini, maka penulis mencantumkan definisi operasional. Yang dimaksud dengan proses penerimaan calon Bintara dan Perwira Polisi adalah proses diterimanya seseorang yang ingin menjadi calon Bintara dan Perwira Polisi dengan mengikuti seluruh kegiatan yang menjadi syarat-syaratnya mulai dari pendaftaran sampai dilantik menjadi calon Bintara dan Perwira Polisi. Proses tersebut yang akan diteliti dan akan ditinjau dalam hukum Islam apakah sesuai dengan yang disyari’atkan dalam hukum Islam atau tidak. Setelah itu lalu disimpulkan.

1. **Tujuan dan Manfaat Peneliitian**
2. **Tujuan Penelitian**
3. Untuk menjelaskan bagaimana proses penerimaan calon Bintara dan Perwira Polisi di Polda Sultra.
4. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang proses penerimaan calon Bintara dan Perwira Polisi di Polda Sultra
5. **Manfaat Penelitian**
6. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana proses penerimaan calon Bintara dan Perwira Polisi di Polda Sultra.
7. Sebagai masukan bagi para pembaca dalam hal ini mahasiswa secara umum dan lebih terkhusus lagi bagi mahasiswa Jurusan Syari’ah STAIN Kendari.
1. **Dolly Bambang Hermawan, *Peningkatan Kinerja Sdm Polri Di Bidang Rekruitmen* (**httpwww.penerimaan.polri.go.idindex.phpmenu=kontenkonten&id\_hal=94.htm, (Akses Tgl. 20 Mei 2012) [↑](#footnote-ref-1)